

## KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

**Devit Bagus Indranika<sup>1\*</sup>, Dyah Retna Puspita<sup>2</sup>, Muslih Faozanudin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

\*Email: devitbagus@gmail.com

### Abstrak

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi sebuah harapan baru sekaligus tantangan bagi pemerintah desa terutama di Kabupaten Banyumas dalam tata kelola pemerintahannya. Pada kenyataannya semakin kompleksnya kewenangan dan urusan yang harus dikelola desa tidak diimbangi kompetensi aparatur pemerintah desa Kabupaten Banyumas terutama kompetensi para perangkat desa yang ada. Kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas diukur dari tiga dimensi diantaranya adalah kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi teknis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data kuisisioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan baik dengan indeks 82,9.

**Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Desa, Tata Kelola Pemerintahan**

### Abstract

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages became the basis of village autonomy. Village autonomy can be a new hope as well as a challenge for village governments, especially in Banyumas Regency in governance. In reality, the increasingly complex authority and functions that must be managed by the village are not matched by the competence of the Banyumas Regency village government apparatus, especially the competencies of the existing village apparatus. The competence of village officials in governance in Banyumas Regency is measured from three dimensions including managerial competence, socio-cultural competence and technical competence. The purpose of this study was to determine and analyze the competence of village officials in governance in Banyumas Regency. This study uses a survey method by collecting questionnaire data, observation and documentation. The results showed that the competence of village officials in governance in Banyumas Regency could be said to be good with an index of 82.9.

**Keywords: Human Resource Competencies, Village Officials, Governance.**

## PENDAHULUAN

Salah satu hal terpenting untuk dapat mewujudkan keberhasilan organisasi ialah sumber daya manusianya. Pentingnya suatu peran manusia dalam organisasi tidak lepas daripada aspek kompetensi manusia itu sendiri. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama berhasilnya tujuan organisasi. Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan organisasi. Kompetensi dapat dimaknai kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kompetensi yang baik akan diikuti kinerja yang optimal.

Kompetensi menjadi sebuah kajian yang menarik terutama pada kompetensi aparatur pemerintahan.

Beberapa kajian yang sudah dilakukan dapat menjadi dasar masih pentingnya mengukur kompetensi terutama pada pemerintahan desa, seperti penelitian Wildan, Fali Suhadi, dan Windijarto (2017) yang menyatakan bahwa "Aparat Desa Blimbing belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan pengelolaan Anggaran Desa, khususnya dalam hal pengetahuan dan etika". Selain itu penelitian Rasman (2018) menyatakan bahwa "Kompetensi aparatur desa di wilayah Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah masih kurang baik". Penelitian Sulismadi, dkk (2017) juga menyatakan bahwa adanya persoalan serius diantaranya adalah minimnya kapasitas sumber daya manusianya, masih kurangnya kuantitas perangkat desa, dan adanya ketidakpahaman perangkat desa terhadap tupoksinya. Temuan-temuan penelitian di berbagai lokus tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dapat dikatakan rendah. Hal tersebut menjadi penting untuk dikaji kembali mengenai kompetensi aparatur pemerintah desa mengingat pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi.

Dampak dari rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa dapat menghambat proses tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hal tersebut didukung dalam pernyataan yang dikutip dari Pontianak Post yaitu "dari hasil monitoring masih ada dua kewajiban yang belum dipenuhi oleh pemerintahan desa. Kewajiban tersebut yaitu dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran dan ada desa yang tidak bisa mengikuti Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyebab belum dilaksanakan kewajiban tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparatur desa untuk menyelesaikan laporan tersebut" (<https://www.pontianakpost.co.id/soroti-kurangnya-pengetahuan-aparatur-desa> diakses pada 15 Maret 2019 Pukul 10:13 WIB). Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak dari rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa mengakibatkan tata kelola pemerintahan menjadi tidak berjalan efektif terutama pada hal penyusunan dokumen, laporan pertanggungjawaban, dan penyelenggaraan suatu perencanaan hingga evaluasi.

Kabupaten Banyumas sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang didalamnya terdapat 331 (tiga ratus tiga puluh satu) desa/kelurahan. Pembagian wilayah desa atau kelurahan di Kabupaten Banyumas adalah 30 (tiga puluh) kelurahan, yang terletak di wilayah Kotip Purwokerto dan 3 (tiga) kelurahan adalah di Kecamatan Sumpiuh. Sedangkan selebihnya yaitu 301 (tiga ratus satu) ialah merupakan desa. Perwujudan pelaksanaan otonomi desa, kewenangan dan tugas pemerintah desa dalam mengelola desa semakin kompleks. Adanya pelaksanaan dari otonomi desa dimaksudkan

memberi kewenangan desa sebagai daerah otonom mengurus dan mengatur desa dalam merencanakan pembangunan desa agar lebih efektif. Pemerintah desa merupakan salah satu aktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Masih minimnya kompetensi perangkat desa menjadi kendala tercapainya tujuan yang diharapkan. Menurut Asrori dan Supratiawan dalam Rosyadi (2016; 13) menunjukkan ada dua penyebab lemahnya kapasitas pemerintah desa dalam mengelola potensi desa pertama tingkat kemampuan perangkat desa belum memadai dan belum dibekali dengan pendidikan dan pelatihan relevan serta pengisian data potensi desa umumnya dilakukan oleh staf yang tidak berkompeten dalam administrasi data desa, kedua kurangnya perhatian pemerintah daerah atau pusat untuk memfasilitasi program-program peningkatan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan data potensi desa. Pendidikan perangkat desa yang masih di bawah standar dapat menjadi perhatian lebih oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk membuat solusi yang efektif. Dalam kenyataannya pendidikan formal yang dimiliki perangkat desa memang mempengaruhi kompetensi yang dimilikinya, tetapi pada dasarnya kompetensi perangkat desa masih dapat dikembangkan seperti halnya menguatkan pelatihan dan pembinaan sehingga tuntutan pekerjaan perangkat desa dapat dilaksanakan. Seperti temuan penelitian yang dinyatakan Azmy (2015) bahwa perlu adanya pengembangan kompetensi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang berkelanjutan.

Semakin tinggi tantangan pembangunan desa yang sudah ditetapkan dengan adanya otonomi desa menuntut pengelolaan dan manajemen pemerintah desa harus lebih adaptif. Kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan desa adalah perangkat desa yang memiliki kompetensi yang dapat mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Peningkatan kompetensi pemerintah desa terutama dalam pengembangan sumber daya manusia perangkat desa sudah menjadi perhatian dari pemerintah desa itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi perangkat desa sudah sangat diperhatikan mengingat sumber daya manusianya masih minim. Minimnya kompetensi yang dilatarbelakangi karena pendidikan perangkat desa yang relatif masih rendah dan minimnya pelatihan-pelatihan perangkat desa secara intens menggerakkan pemerintah mencanangkan beberapa program atau kegiatan untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa. Hal tersebut bertujuan untuk dapat terwujudnya pemerintahan desa yang baik, adaptif, transparan, akuntabel, dan memiliki pola partisipatif. Sehingga adanya hal tersebut akan menunjang tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Namun pada kenyataannya pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan kurang efektif karena hanya berupa sosialisasi dan pembelajaran secara umum tidak secara teknis. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Rosyadi dkk (2015; 13) dalam studinya menemukan bahwa :

“Keterlibatan perangkat desa dalam program pelatihan keahlian masih sangat minim. Bahkan jika tersedia tawaran program pelatihan keahlian, materi pelatihan tersebut tidak berkaitan erat dengan kebutuhan peningkatan keahlian perangkat desa khususnya dalam pengelolaan anggaran dana desa yang jumlahnya cukup besar”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan kurang berdampak pada sasaran yaitu perangkat desa karena beberapa pelatihan yang sudah dijalankan merupakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya masih secara umum.

Rendahnya kompetensi yang dimiliki menjadi faktor penyebab dalam praktik korupsi dalam pemerintah desa. Hal tersebut didukung oleh pernyataan SAKTI (Sekolah Anti Korupsi) berhasil mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi penyebab potensi korupsi penyelewengan anggaran desa, salah satu penyebab potensi korupsi adalah minimnya kompetensi aparat pemerintah desa (<https://www.kalderanews.com/2018/11/inilah-penyebab-dan-solusi-maraknya-korupsi-dana-desa/> diakses pada 20 Juni 2019 Pukul 09:27 WIB). Korupsi dalam pemerintah desa sudah dikhawatirkan dengan adanya kucuran dana desa yang cukup besar terutama di Kabupaten Banyumas, seperti kasus yang dikutip (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/13/p5jabu335-kejari-purwokerto-tahan-lima-perangkat-desa-karena-korupsi> diakses pada 20 Juni 2019 Pukul 09:35 WIB) yang menyatakan bahwa “Kejaksaan Negeri Purwokerto, menahan lima perangkat desa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi keuangan pemerintah desa. Kelima perangkat desa tersebut terdiri dari dua kepala. Tiga tersangka lainnya yaitu bendahara pemerintah Desa Tipar, Sekretaris Desa dan Kasi Kesejahteraan Rakyat pemerintah Desa Krajan”. Adanya hal tersebut meningkatkan kompetensi perangkat desa menjadi penting untuk dilakukan.

Berbagai permasalahan yang ada terutama pada kompetensi perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas membuat penelitian ini perlu untuk dilakukan. Dengan adanya sebagian perangkat desa yang masih belum memenuhi amanat Undang-Undang desa dalam hal pendidikan, pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan yang sifatnya masih secara umum sehingga kurang tepat sasaran menjadi suatu permasalahan dalam proses tata kelola pemerintahan desa. Adanya berbagai permasalahan yang sudah ditunjukkan, kajian mengenai kompetensi perangkat desa menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji. Dengan demikian penelitian ini menganalisis mengenai kompetensi perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kompetensi Manajerial**

Robbins (2009: 7) mendefinisikan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan kerja yang di dalamnya melibatkan koordinasi dan pengawasan, sehingga suatu pekerjaan itu dapat

terselesaikan dengan efisien dan efektif. Ada beberapa tingkatan dalam manajer diantaranya adalah manajer puncak (top manager) yaitu yang bertanggung jawab atas pengambilan suatu keputusan yang mempengaruhi jalannya organisasi, dan menentukan rencana kerja dan sasaran untuk organisasi. Kedua adalah manajer menengah (middle manager) merupakan seseorang yang ada diantara posisi jenjang terbawah dan jenjang teratas dalam organisasi. Ketiga manajer lini pertama (first-line manager), diartikan dengan mengelola pekerjaan staf non-manajerial melibatkan kegiatan produksi barang-barang atau jasa para pelanggan. Dan keempat di tingkatan yang terbawah adalah karyawan non-manajerial. Pada dasarnya dalam manajemen terdapat beberapa fungsi yang harus diterapkan yaitu diantaranya menurut Terry yang dikutip oleh Sukarna (2011: 10) menjelaskan ada beberapa fungsi dalam manajemen diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Krajcovicova, Caganova, dan Cambal, (2012: 1121) dalam memahami kompetensi manajerial ada empat pilar dalam kompetensi yaitu memahami organisasi, memimpin dan mengelola orang, mengelola sumber daya, dan berkomunikasi secara efektif.

Dalam penelitian ini kompetensi manajerial Perangkat Desa dapat diadaptasi dari empat fungsi yang ada pada manajemen yaitu merencanakan kegiatan kerja, mengelola kegiatan kerja, melaksanakan kegiatan kerja dan mengawasi kegiatan kerja. Kompetensi manajerial Perangkat Desa tersebut dapat ditentukan dengan merencanakan suatu kegiatan pekerjaan yang di dalamnya menyangkut membuat, memahami, dan memiliki kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pekerjaan. Mengelola suatu kegiatan pekerjaan yang di dalamnya menyangkut kemampuan mengatur/mengelola kegiatan kerja, menjalin kerjasama yang baik dengan rekan kerja dan masyarakat sesuai dengan tupoksinya. Melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan sesuai dengan rencana yang di dalamnya menyangkut kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ditentukan, kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diharapkan, dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Mengawasi suatu kegiatan pekerjaan yang di dalamnya menyangkut mampu melakukan pengawasan dan evaluasi dalam setiap kegiatan kerja.

### **Kompetensi Sosio Kultural**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sosio kultural merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Dinyatakan oleh Ranjabar (2006: 9) mendefinisikan bahwa sosial budaya dapat dimaknai juga di dalamnya adalah sosial dan budaya yaitu sebagai berikut:

“Sosial atau dapat dikatakan kemasyarakatan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sistem hidup bersama dalam masyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya mencakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Sedangkan budaya atau kultur atau dapat disebut pula kebudayaan adalah cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal

balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang didalamnya sudah tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik materiil maupun yang psikologis, idiil, dan spiritual”.

Selain itu ditegaskan pula oleh Tylor yang dikutip oleh Tilaar (2002: 39) menyatakan “Budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”. Condon (1973: 4) mendefinisikan bahwa sosio kultural adalah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur segala perilaku manusia. Dari berbagai pandangan mengenai sosio kultural tersebut dapat dikatakan bahwa kompetensi sosio kultural memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan terutama di Indonesia.

Dalam penelitian ini indikator pada kompetensi sosio kultural dapat ditentukan dengan membantu pemerintah dalam mempersatukan masyarakat di tengah kemajemukan yang di dalamnya menyangkut pengetahuan Perangkat Desa tentang budaya masyarakat, dan selalu dapat menerapkan sikap toleransi di tengah masyarakat. Menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di dalamnya pula menyangkut mendukung adanya persatuan dan kesatuan yang tercipta dalam masyarakat dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dengan mengerti ideologi negara yaitu pancasila.

### **Kompetensi Teknis**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan kompetensi teknis merupakan suatu pengetahuan, maupun keterampilan dan sikap yang dapat diukur diamati dan dikembangkan yang di dalamnya berhubungan dengan bidang teknis jabatan. Pada dasarnya kompetensi teknis ini berdasarkan masing-masing tugas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Di Kabupaten Banyumas sendiri hal tersebut tertuang dalam peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Disebutkan Perangkat Desa yang meliputi sekretaris desa yang dibantu oleh kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan. Selain itu ada pelaksana kewilayahan yaitu kepala dusun yang wilayah kerjanya pada dusun yang bersangkutan serta pelaksana teknis yaitu kepala seksi yang terdiri dari kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pemerintahan.

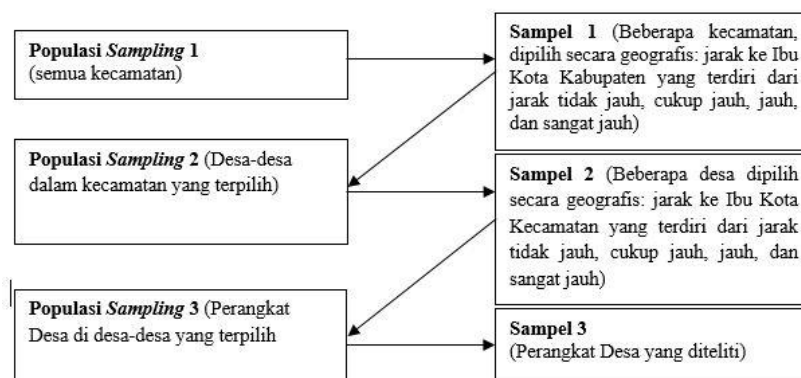
Kompetensi teknis di dalamnya ada dua jenis kompetensi yaitu kompetensi yang bersifat umum (kompetensi Generik) dan kompetensi yang bersifat khusus (kompetensi spesifik). Pada dasarnya kompetensi teknis ini berdasarkan masing-masing tugas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Di Kabupaten Banyumas sendiri aturan tersebut berupa peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Kompetensi generik dapat ditentukan dengan menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kompetensi spesifik dapat ditentukan dengan masing-masing tupoksi Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Dusun yang di dalamnya meliputi penggunaan sarana kantor dan melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian survei. Adanya populasi dalam obyek penelitian yang akan diteliti sangat luas berdasarkan wilayah geografis teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *multi stage sampling* atau dapat disebut gugus bertahap. Penelitian ini mengambil sampel berdasarkan klasifikasi jarak yaitu jarak tidak jauh, cukup jauh, jauh dan sangat jauh yang dapat dijelaskan pada bagan berikut:

Gambar 1. Teknik Pengambilan Sampel Gugus Bertahap (*Multi stage sampling*)



Instrumen penelitian dapat ditunjukkan melalui kuisioner dengan skala Likert. Terdapat skoring dalam menentukan jenjang, dimana dalam penelitian ini jenjang skor tersebut adalah jenjang skor 5 (lima). Jenjang skor tersebut didasarkan pada jawaban bernilai positif dengan skor tertinggi yaitu 5 (lima) dan skor terendah yaitu 1 (satu). Pengumpulan data menggunakan kuisioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan distribusi frekuensi, mean (nilai rata-rata), standar deviasi dan tabulasi silang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kompetensi Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas

Secara lebih spesifik masing-masing dimensi kompetensi Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dapat dijabarkan dari setiap jawaban responden. Masing-masing jawaban responden ditentukan dengan menggunakan indeks. Cara mencari nilai indeks dapat

ditentukan dengan menghitung nilai perolehan dan nilai harapan yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = (\sum \text{Nilai Perolehan}) / (\sum \text{Nilai Harapan}) \times 100$$

Nilai perolehan didapat dari jumlah total skor jawaban responden dikalikan banyaknya responden dari masing-masing skor sedangkan nilai harapan didapat dari jumlah skor maksimal dikalikan keseluruhan jumlah responden.

Berdasarkan indeks jawaban responden dapat dikategorikan menjadi lima kelas interval dimana dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Interval} = (\text{Nilai harapan tertinggi} - \text{Nilai terendah}) / \text{jumlah kelas}$$

$$\text{Interval} = (100-20,00) / 5$$

$$\text{Interval} = 16,0$$

Dari interval tersebut dapat ditentukan kategori terhadap jawaban responden secara keseluruhan yang dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Nilai Interval Indeks Kompetensi Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.

No	Kategorisasi	Interval Indeks
1	Sangat tidak tahu/sangat tidak paham/sangat tidak baik/sangat tidak mampu/sangat tidak tepat waktu/sangat tidak sesuai dengan perintah/tidak pernah sama sekali/sangat tidak penting/sangat tidak menguasai	20,0-36,0
2	Tidak tahu/ tidak paham/ tidak baik/ tidak mampu/ tidak tepat waktu/ tidak sesuai dengan perintah/ hampir tidak pernah/tidak penting/tidak menguasai	36,1-52,1
3	Cukup/Kurang tahu/ kurang paham/ kurang baik/ kurang mampu/ kurang tepat waktu/ kurang sesuai dengan perintah/kadang-kadang/kurang penting/kurang menguasai	52,2-68,2
4	Tahu/paham/baik/mampu/tepat waktu/sebagian besar sudah sesuai dengan perintah/sering/penting/menguasai	68,3-84,3
5	Sangat tahu/sangat paham/sangat baik/sangat mampu/sebelum waktu yang ditentukan/selalu sesuai dengan perintah/selalu/sangat penting/sangat menguasai	84,4-100

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2019

Tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas dapat efektif dilihat dari dimensi kompetensi Perangkat Desanya yang terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi teknis Perangkat Desa. masing-masing dimensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

### Kompetensi Manajerial

Manajerial dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan manajemen yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai suatu efektivitas kerjanya. Hal tersebut ditambahkan oleh pernyataan Robbins (2009: 7) bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan kerja yang di dalamnya melibatkan koordinasi dan pengawasan, sehingga suatu pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan efisien dan efektif. Perangkat Desa termasuk dalam pelaksana manajerial pemerintahan desa. Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sudah dapat menjalin kerjasama dengan sangat baik antar rekan kerjanya, dapat bekerjasama dengan masyarakat secara baik dan mampu mengelola kegiatan desa dikarenakan sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas setiap hari dapat berinteraksi dengan sesama rekan kerja dan hampir setiap hari berinteraksi dengan masyarakat serta selalu berpartisipasi dalam kegiatan desa.



Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagian besar mampu melaksanakan tugas pekerjaannya, tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan dalam menyelesaikan pekerjaan sebagian besar sudah sesuai dengan perintah. Meskipun dalam pelaksanaannya pernah menjumpai beberapa kesulitan tetapi sebagian besar sudah mampu diatasi. Sedangkan dalam hal pengawasan dan evaluasi sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dapat melaksanakan pengawasan secara intens dari berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila Perangkat Desa mampu untuk merencanakan, mengelola, melaksanakan dan melakukan pengawasan yang baik terhadap setiap kegiatan kerja. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Effendi (2007) bahwa aparatur pemerintah dapat berdayaguna apabila dapat merumuskan beberapa hal yaitu perencanaan yang baik (*well plan*), pengaturan yang baik (*well organize*), siapa yang membawa apa (*who bring what*), pengaturan yang baik, dan kontrol / pengawasan yang baik (*well control/ supervise*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kemampuan merencanakan kegiatan kerja Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas adalah baik yang dapat ditunjukkan dengan sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sudah mengetahui dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pekerjaannya.

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa adanya kecenderungan hubungan antara kompetensi manajerial dengan tingkat pendidikan responden atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka memiliki kecenderungan semakin baik pula kompetensi manajerial yang dimiliki. Dengan demikian tingkat pendidikan menjadi penting demi mencapai kompetensi manajerial yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirwana (2017) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kompetensi pemerintah desa Surya Indah dalam pembangunan desa meliputi pendidikan formal, pelatihan dan pembinaan serta pengalaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyetaraan pendidikan dan adanya pelatihan-pelatihan yang efektif akan mendukung pembangunan kompetensi manajerial Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.

Dapat disimpulkan kompetensi manajerial Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas sudah dapat dikatakan baik. Dengan adanya perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik oleh Perangkat Desa akan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dengan didukung adanya pendidikan yang memadai sesuai dengan standar minimal pendidikan yang sudah ditetapkan dan pelatihan-pelatihan manajerial yang efektif.

### **Kompetensi Sosio Kultural**

Kompetensi sosio kultural dapat dimaknai dengan segala kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan masyarakat misalnya dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan perinsip. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ranjabar (2006: 9) bahwa sosial budaya dapat dilihat dari makna sosial dan budaya. Makna sosial atau dapat dikatakan kemasyarakatan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sistem hidup bersama dalam masyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya mencakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Sedangkan makna budaya atau kultural merupakan cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang didalamnya sudah tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik materiil maupun yang psikologis, idiil, dan spiritual. Condon (1973: 4) juga menyatakan bahwa sosio kultural adalah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur segala perilaku manusia. Kompetensi sosio kultural harus dapat dimiliki oleh setiap Aparatur Pemerintah terutama Perangkat Desa sebagai pelaksana terbawah kegiatan pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kompetensi sosio kultural Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas memiliki kategori kompetensi sosio kultural sangat baik. Kompetensi sosio kultural Perangkat Desa dapat diukur dari kemampuan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dalam membantu pemerintah mempersatukan masyarakat dan kemampuan menjaga dan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kompetensi sosio kultural Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dalam membantu pemerintah mempersatukan masyarakat masuk dalam kategori sangat baik yang dapat ditunjukkan dengan sebagian besar Perangkat Desa tahu budaya masyarakat desanya, dapat selalu menerapkan sikap toleransi dan selalu mendukung sikap toleransi. Kemampuan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dalam menjaga dan mewujudkan persatuan dan kesatuan masuk dalam kategori sangat baik yang dapat ditunjukkan dengan sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas tahu arti pancasila dan selalu mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi sosio kultural Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori sangat baik. Dalam tata kelola pemerintahan di Desa, pentingnya Perangkat Desa untuk memiliki kompetensi sosio kultural. Kompetensi sosio kultural yang dimiliki Perangkat Desa sebagai upaya untuk perekat bangsa. Sejalan dengan penelitian Sartika (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi kultural aparatur antara lain mengelola keragaman lingkungan budaya, membangun network sosial, manajemen konflik, empati sosial dan kepekaan gender. Dengan demikian kompetensi sosio kultural Perangkat Desa sangatlah

penting, karena pemerintah desa merupakan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa tidak adanya kecenderungan hubungan antara kategori kompetensi sosio kultural dengan kategori pendidikan responden, sehingga tingkat pendidikan tidak memiliki kecenderungan hubungan dengan kompetensi sosio kultural Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas. Kompetensi sosio kultural lebih efektif dikembangkan melalui diklat kebangsaan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Sartika (2016) bahwa pengembangannya dengan melakukan refleksi tentang internalisasi budaya (melalui pikiran sadar dan pikiran bawah sadar), menganalisis kekuatan perbedaan budaya, strategi peningkatan kesadaran budaya dan mendemonstrasikan sensitifitas budaya dan identifikasi model pengembangan. Selain itu pernyataan Effendi (2007) yang menyatakan setiap aparatur negara harus mengubah mindset, membangun karakter dan jatidiri, bekerja profesional, dan mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ke arah peningkatan produktivitas kerja.

Pada dasarnya setiap jabatan Perangkat Desa memiliki kompetensi sosio kultural yang sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan bahwa rata-rata kompetensi sosio kultural Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas memiliki kategori sangat baik. Kompetensi sosio kultural yang sangat baik menunjukkan bahwa adanya keinginan pemerintah desa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut dilakukan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan melalui program-program ditingkat desa. Hal tersebut mendukung adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah terendah menjadi strategi tersendiri dalam mewujudkan partisipasi masyarakat. Salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik adalah selalu melibatkan masyarakat disetiap kegiatan pemerintahan sehingga tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik.

### **Kompetensi Teknis**

Kompetensi teknis merupakan kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya. Kompetensi teknis menekankan pada orang yang tepat untuk tempat atau bidang yang tepat, sehingga efektivitas tata kelola pemerintahan dapat terwujud. Sejalan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Abdussamad (2015) bahwa pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor publik pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Kompetensi teknis di dalamnya ada dua jenis kompetensi yaitu kompetensi yang bersifat umum (kompetensi Generik) dan kompetensi yang bersifat khusus (kompetensi spesifik).

Berdasarkan kuisioner terbuka dan hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Perangkat Desa mampu melaksanakan administrasi pemerintahan desa, mampu melaksanakan pembangunan desa, mampu melaksanakan pembinaan masyarakat dan mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian pada pelaksanaannya Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas terkadang masih mengalami kesulitan untuk mengatasi beberapa permasalahan. Masih minimnya partisipasi masyarakat secara luas menghambat atau menyulitkan Perangkat Desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang sejatinya adalah melibatkan semua elemen masyarakat.

Sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sadar akan sangat pentingnya penguasaan komputer atau laptop dalam pekerjaan, mampu dalam pengoperasionalan komputer atau laptop, menguasai dalam pengoperasionalan microsoft office misalnya penggunaan microsoft word, excel, power point dan mampu menggunakan internet dalam pekerjaan. Meskipun demikian pada pelaksanaannya Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas terkadang masih mengalami kesulitan dalam pengoperasionalan teknologi informasi dan komunikasi dan terkadang kesulitan tersebut sulit untuk diatasi terutama pada penggunaan microsoft word, excel, power point. Masih belum optimalnya kapasitas pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan Perangkat Desa dalam melaksanakan pekerjaan yang menggunakan media komputer maupun laptop terkadang manjumpai kesulitan yang tidak selalu dapat diatasi.

Dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagian besar pernah mengalami kesulitan dan terkadang tidak dapat mengatasi kesulitan tersebut. Berdasarkan hasil indeks item pertanyaan masing-masing jabatan kompetensi teknis Perangkat Desa menunjukkan adanya indeks terendah jabatan perangkat Desa yang diantaranya jabatan Sekretaris Desa dalam pengurusan kearsipan, Kepala Dusun dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan masyarakat dusun, Kepala Urusan TU dan Umum dalam pengurusan tata naskah, Kepala Urusan Keuangan dalam verifikasi administrasi keuangan desa, Kepala Urusan Perencanaan dalam pengurusan inventarisasi data pembangunan, Kepala Seksi Pemerintahan dalam melakukan pembinaan ketertiban masyarakat Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan dalam melaksanakan sosialisasi kebudayaan dan Kepala Seksi Pelayanan dalam mengurus ketenagakerjaan di masyarakat.

Kompetensi teknis spesifik Perangkat Desa dapat diukur dari kemampuan menggunakan sarana kantor yang menunjang pekerjaan dan kemampuan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatannya masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kompetensi teknis spesifik Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dalam kemampuan menggunakan sarana kantor yang menunjang pekerjaan masuk dalam kategori baik yang dapat ditunjukkan dengan sebagian besar Perangkat Desa

menganggap sangat penting penguasaan komputer atau laptop dalam pekerjaan, mampu dalam pengoperasionalan komputer atau laptop, menguasai dalam pengoperasionalan microsoft office misalnya microsoft word, excel, power point dan lain sebagainya dan mampu menggunakan internet dalam pekerjaan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori baik yang dapat ditunjukkan dengan pahamiannya Perangkat Desa dan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya.

Kompetensi teknis Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas memiliki rata-rata indeks terendah dibandingkan dengan kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural. Setiap jabatan Perangkat Desa masing-masing memiliki tugas pokok fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi pemerintah desa. Masing-masing tugas pokok fungsi Perangkat Desa yang sudah ditetapkan harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hambatan efektifnya tata kelola pemerintahan desa mengenai kompetensi teknis Perangkat Desa harus selalu dapat di atasi. Sejalan dengan pernyataan Saragih (2012) bahwa tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah akan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas aparatur sumber daya.

Dapat disimpulkan kompetensi teknis Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas sudah dapat dikatakan baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik kompetensi teknis Perangkat Desa menjadi bagian terpenting. Peran dari masing-masing Perangkat Desa dalam melaksanakan pekerjaannya akan sangat mempengaruhi efektifnya tata kelola pemerintahan desa. Tuntutan pertanggung jawaban dan transparansi keuangan dan kinerja harus selalu dapat dilakukan. Kemampuan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan administrasi, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat serta didukung dengan kemampuan pengelolaan sarana kantor dan baiknya pelaksanaan tugas pokok fungsi masing-masing jabatan Perangkat Desa mendorong tercapainya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi baik dalam penyelenggaraan administrasi desa maupun pelaporan pertanggung jawaban keuangan dan kinerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan penelitian bahwa kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan baik dengan indeks 82,9. Kompetensi teknis Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas memiliki rata-rata indeks terendah dibandingkan dengan kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural. **Kompetensi manajerial** Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas menunjukkan kategori baik dengan indeks 81,2. Karakteristik responden berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa kompetensi manajerial sangat baik didominasi oleh Sekretaris Desa, baik didominasi oleh Kepala Dusun

dan Cukup didominasi oleh Kaur Keuangan dan Kasi Pelayanan. **Kompetensi sosio kultural** Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas menunjukkan kategori sangat baik dengan indeks 89,2. Karakteristik responden berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa kompetensi sosio kultural sangat baik didominasi oleh Kaur Keuangan, baik didominasi oleh Kasi Pemerintahan dan Cukup didominasi oleh Kaur TU dan Umum dan Kaur Perencanaan. **Kompetensi teknis** Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas menunjukkan kategori baik dengan indeks 78,4. Karakteristik responden berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa kompetensi teknis sangat baik didominasi oleh Sekretaris Desa, baik didominasi oleh Kasi Kesejahteraan dan Cukup didominasi oleh Kasi Pelayanan.

### Implikasi

Perlu adanya penyetaraan pendidikan untuk Perangkat Desa yang masih belum memenuhi standar minimal pendidikan Perangkat Desa. Dalam melaksanakan hal yang berhubungan dengan kompetensi manajerial Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebaiknya didasarkan pada pengawasan yang intens dalam setiap kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing jabatan Perangkat Desa. Pengawasan dan evaluasi hendaknya selalu dilakukan, hal tersebut untuk mengantisipasi tidak efektif dan efisiennya kegiatan. Pemerintah perlu membuat wadah komunikasi yang intens untuk memudahkan Perangkat Desa menanyakan atau mencari solusi dari setiap kesulitan yang dihadapi. Selain itu pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis sangat perlu untuk dilakukan seperti pengelolaan website mengenai profil desa, penggunaan microsoft office, dan pelatihan yang berhubungan dengan masing-masing tugas Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Yuriko. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Kompetensi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Arsani, Ukik Sheli. (2017). Kapasitas Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Dana Desa (Studi di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas). Thesis.
- Asrori. (2015). "Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus". Vol 6, No 2, Page 101-116.
- Azmy, Ahmad. (2015). "Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai Career Ready Professional Di Universitas Tanri Abeng". Vol 6, No 2.
- Condon. (1973). *Introduction to Cross Cultural Communication*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Effendi, Taufik., 2007, Arah Dan Strategi Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Rangka Efektivitas Pembangunan Dan Terwujudnya *Good Governance*, Bahan Ceramah Menpan

- Pada Diklat-Pim II Dalam Jurnal Kumpulan Artikel Reformasi Birokrasi Pemerintahan Di Daerah Menuju Good Governance, Pkp2a I Bandung, Bandung.
- G, Jopinus Saragih . (2012). Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (*Good Governance*). Jurnal Ilmiah Widya, <https://www.neliti.com/id/publications/218756/reformasi-aparatur-negara-untuk-melaksanakan-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik>
- Krajcovicova, K., Caganova, D., dan Cambal, M. (2012). *Key managerial competencies and competency models in industrial enterprises. Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium*, 23(1).
- Nirwana, Cahaya Prima. (2017). Kompetensi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau.
- Raharja, Wildan Taufik., Fali Suhadi, Windijarto. (2017). "Kompetensi dalam Layanan Publik (Studi kasus: Anggaran Manajemen di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Indonesia)". Vol 7, No 1.
- Ranjabar, Jacobus. (2006). "Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar". Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasman. (2018). "Kompetensi Aparatur Desa Di Wilayah Kecamatan Budongbudong Kabupaten Mamuju Tengah".
- Robbins, Stephen P. (2009). Manajemen Edisi Kesepuluh. Terjemahan oleh Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera. 2010. Erlangga, Jakarta.
- Rosyadi, Slamet. (2016). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Konteks Desentralisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sartika, Dewi. (2016). Penyusunan Standar Kompetensi Sosio Kultural Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Di Pemerintahan Daerah Formulation Of Socio Cultural Competency Standards For Senior Executives In Local Governments (Case Study In Aceh And North Sumatra). [https://www.researchgate.net/publication/323005217\\_Penyusunan\\_Standar\\_Kompetensi\\_Sosio\\_Kultural\\_untuk\\_Jabatan\\_Pimpinan\\_Tinggi\\_di\\_Pemerintahan\\_Daerah](https://www.researchgate.net/publication/323005217_Penyusunan_Standar_Kompetensi_Sosio_Kultural_untuk_Jabatan_Pimpinan_Tinggi_di_Pemerintahan_Daerah).
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sulismadi., dkk. (2017). "Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya". Vol 5, No 1.
- Tilaar. (2002). Pendidikan Kebudayaan dan masyarakat Madani Indonesia, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

**Sumber Lain:**

<https://www.pontianakpost.co.id/soroti-kurangnya-pengetahuan-aparatur-desa>. Diakses pada 15 Maret 2019 Pukul 10:13 WIB.

<https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/31/08/2017/korupsi-masuk-desa>. Diakses pada Diakses pada 15 Maret 2019 Pukul 10:24 WIB.

<https://www.kalderanews.com/2018/11/inilah-penyebab-dan-solusi-maraknya-korupsi-dana-desa/>. Diakses pada Diakses pada 15